

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Seksi : Keluarga Berencana

Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Pengadaan kit siap nikah anti stunting	10 paket
Pengadaan kit BKB Stunting	10 paket
Panitia Pengadaan	2 paket
PPHP dan PjPHP	2 paket
Alat tulis kantor	1 paket
Belanja Bahan Bakar Minyak	1 paket
Belanja Perjalanan Dinas	1 paket

Dana : Rp. 280.000.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah))

Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2021

**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGADAAN SARANA KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA / UPPKS)**

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten	: Pesisir Selatan
OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
Hasil	: 1. Tersedianya infrastruktur sistem data keluarga di Balai Penyuluhan KB 2. Tersedia furniture dan kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Keluaran	: Meningkatnya cakupan Program KKBPK

A Latar Belakang

Dalam rangka Optimalisasi penyebaran dan pemberian layanan informasi untuk menurunkan prevalensi stunting, maka BKKBN sebagai salah satu instansi yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang berguna untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, sehingga mereka mampu melangsungkan kehidupannya dari jenjang pendidikan secara terencana, bekerja serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi memerlukan juga dukungan sarana prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).

Sarana prasarana penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ini berupa Kit Siap nikah anti stunting yang nantinya akan diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada remaja dan Petugas Klinik KB serta PKB/PLKB dilapangan, guna menurunkan prevalensi stunting di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan dengan adanya dukungan Kit siap nikah anti stunting ini juga akan memudahkan tugas Kader kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR). Hal ini sejalan juga dengan hasil studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam *journal of Nutrition Collage*, menyampaikan bahwa pernikahan itu harus siap segala-galanya, termasuk siap menjaga anak supaya tidak stunting. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin dini usia pasangan menikah, maka semakin meningkat persentase anak pendek dan kurang gizi.

Begitu juga dengan Bina Keluarga Balita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Berbagai upaya pengembangan materi dan media promosi program BKB sudah diupayakan. Lewat sejumlah hal, seperti stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. Pelaksanaan layanan

BKB saat ini sudah terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD. Dalam rangka Optimalisasi penyebaran dan pemberian layanan informasi ini oleh Petugas Klinik KB serta PKB/PLKB dilapangan diperlukan dukungan sarana berupa BKB Kit anti stunting. Tugas Kader Poktan BKB tentunya juga akan lebih mudah jika didukung BKB Kit anti stunting ini.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 bermaksud untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dengan pengadaan 10 unit sarana KIE berupa Kit Siap nikah anti stunting dan pengadaan 10 unit sarana KIE berupa BKB Kit anti stunting yang akan diprioritaskan untuk lokus yang mempunyai kasus stunting dengan persentase tertinggi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pengadaan Sarana BKB Kit anti stunting ini dimaksudkan untuk membantu melakukan pembinaan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki anak usia balita karena merupakan periode kritis dalam pembentukan kepribadian individu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal.

2. Tujuan

- a.) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan PLKB/PKB dalam pelaksanaan KIE
- b.) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh guna mencapai tumbuh kembang yang optimal
- c.) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dan sasaran dalam perkembangan anak balita
- d.) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dan sasaran dalam mempersiapkan Generasi

C. Target

1. Tersedianya kit siap nikah anti stunting untuk 10 kelompok PIK-R.
2. Tersedianya kit BKB stunting untuk 10 kelompok BKB.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana dan Sub Bidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 410/ /SK/DPMDPPKB-PS/2020 Tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

E. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang akan diserahkan kepada:

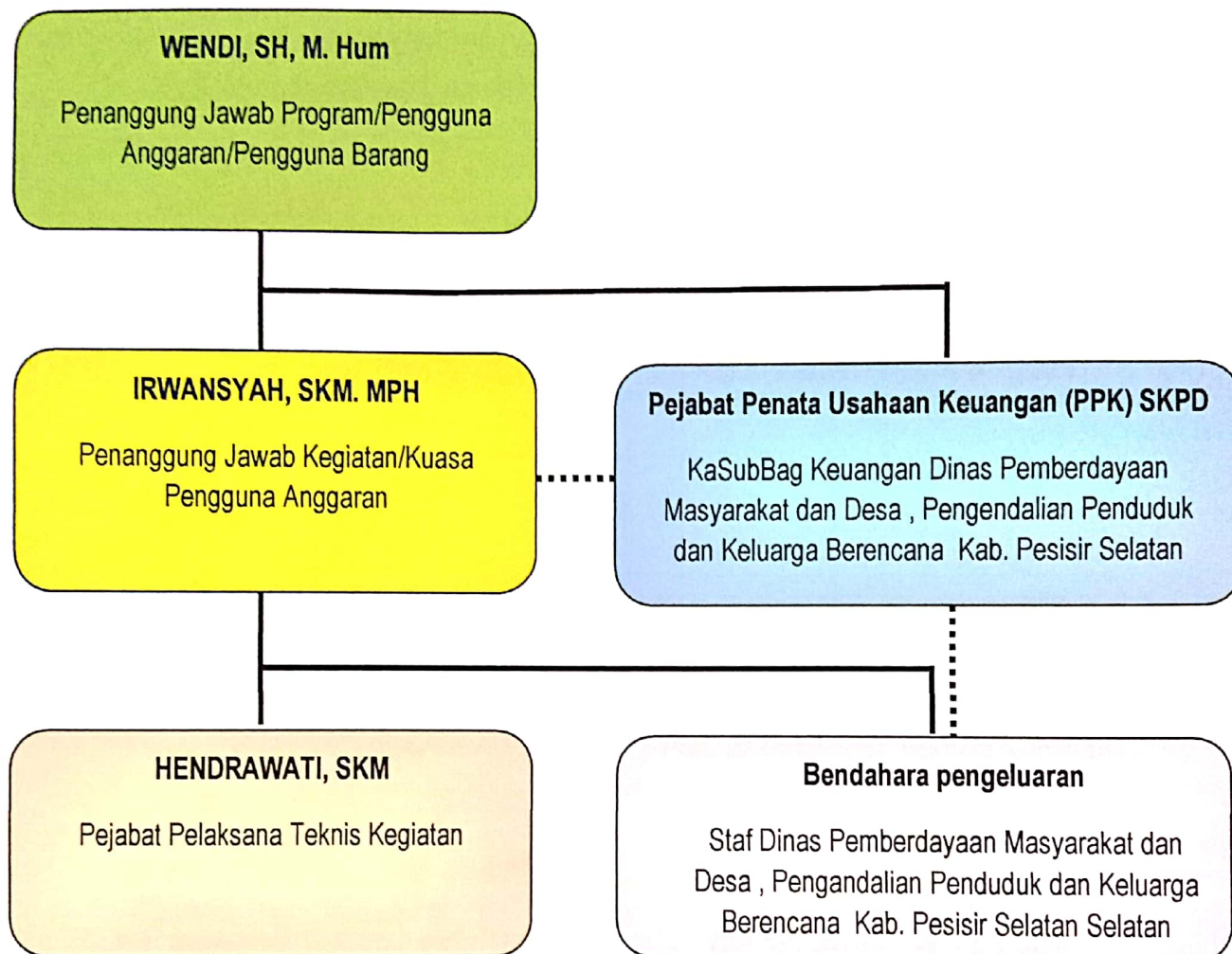
1. Kit Siap Nikah Anti Stunting

Kecamatan	Lokus		Nama Kelompok PIK Remaja
		Desa/Kelurahan	
Koto XI Tarusan	1	Barung-Barung Balantai Tengah	Barung-Barung Balantai Tengah
	2	Taratak Sungai Lundang	Taratak Sungai Lundang
	3	Batu Hampa	Remaja Damai dan Santun
Bayang	4	Kubang Koto Barapak	Cisokan Kubang
IV Jurai	5	Lumpo	Milenial
	6	Taratak Tengah Lumpo	Taratak Tengah Lumpo
Batang Kapas	7	IV Koto Mudiak	Cinduamato
Lengayang	8	Lakitan	Lakitan
Air Pura	9	Inderapura Timur	Inderapura Timur
Lunang	10	Lunang Barat	Bhakti Karya

2. Kit BKB Stunting

Kecamatan	Lokus		Nama Kelompok BKB
		Desa/Kelurahan	
Koto XI Tarusan	1	Barung-Barung Balantai Tengah	Barung-Barung Balantai Tengah
	2	Taratak Sungai Lundang	Sesejuk Embun Pagi
	3	Batu Hampa	Tulip
Bayang	4	Kubang Koto Barapak	Anakku Sayang
IV Jurai	5	Lumpo	Mawar Merah
	6	Taratak Tengah Lumpo	Taratak Tengah
Batang Kapas	7	IV Koto Mudiak	Apel
Lengayang	8	Lakitan	Sayang Bunda
Air Pura	9	Inderapura Timur	Al Furqon
Lunang	10	Lunang Barat	Anggrek

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA / UPPKS)**



F. Penanggung Jawab dan Pengelola Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang KB DPMD&PPKB selaku Kuasa Pengguna Anggaran bidang KB. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan personil sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditunjuk Kepala Seksi KB.
3. Tenaga administrasi sebanyak 1 orang

G. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metoda Pelaksanaan

Semua pekerjaan pengadaan dilakukan dengan proses lelang umum.

3. Tenaga administrasi sebanyak 1 orang

G. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metoda Pelaksanaan
Semua pekerjaan pengadaan dilakukan dengan proses lelang umum.
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan
 - a. Penyusunan organisasi pengelola kegiatan, dilakukan pada bulan Januari 2021
 - b. Lelang Umum dilakukan bulan April 2021
 - c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan Bulan Mei 2021
 - d. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan dilakukan setiap bulannya Februari sampai Desember 2021.

H. Sumber Dana

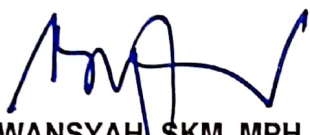
Sumber dana Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Sub bidang Keluarga Berencana (DAK Fisik Penugasan), dengan jumlah dana Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

I. Jangka Waktu Pelaksanaan

Bulan Januari sampai dengan Desember 2021

Painan, Januari 2021

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


IRWANSYAH, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HENDRAWATI, SKM
NIP 19720229 199101 2 001

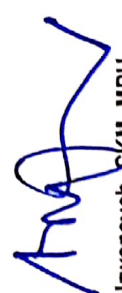
Menyetujui:
Kepala Dinas PMD&PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDI SH, M. Hum
NIP 19760407 199803 1 005

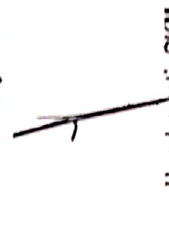
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA / UPPKS)
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
A. PERSIAPAN			I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Inventarisasi Kebutuhan administrasi													
2	Pembuatan KAK													
4	Koordinasi dengan ULPBJ													
5	Pembuatan SK Pejabat pengadaan													
6	Pembuatan SK panitia penerima hasil pekerjaan													
B. PELAKSANAAN														
1	Penyusunan HPS													
2	Penyusunan KAK lelangkit siap nikah anti stunting													
3	Penyusunan KAK lelang kit BKB stunting													
4	Proses RUP													
5	Rapat persiapan lelang dengan ULPBJ													
6	Pelaksanaan lelang													
7	Pelaksanaan pengadaan / pekerjaan													
8	Distribusi hasil pengadaan													
C. Monitoring / Evaluasi														
1	Monitoring													
2	Evaluasi													

Kepala Bidang PP dan KB
Dinas PMD, PP dan KB Kab. Pesisir Selatan


Irwansyah, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

PPTK Kegiatan


Hendrawati, SKM
NIP 19720229 199101 2 001